



STRATEGI KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL UNTUK MENCEGAH PERANG INFORMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Dian Budi Lestari, Moch Afifuddin, Susaningtyas Nefo H. Kertopati

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong manusia lebih informatif dan revolusioner, serta berkomunikasi secara praktis dan dinamis. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, manusia juga dapat terlibat dengan kejahatan seperti persebaran informasi hoaks dan aksi terror, yang dilakukan dalam berbagai platform di media informasi. Di Indonesia, penggunaan teknologi informasi didukung dan diawasi oleh lembaga pemerintah yang mengawasi masyarakat untuk dapat bijaksana dalam penggunaannya. Namun, seiring dengan alih fungsi teknologi informasi yang semakin pesat, penyalahgunaan media sosial berupa persebaran informasi hoaks juga semakin berkembang. Untuk itu, penelitian ini memiliki Tujuan untuk mengidentifikasi persebaran informasi hoaks tersebut, serta menganalisis keterlibatan lembaga pemerintah dalam upaya strategi penanganannya. Metode yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang didapatkan berupa identifikasi kategori issue informasi hoaks, serta tingkat keseringan persebaran informasi hoaks pada platform media sosial. Hasil yang didapatkan selanjutnya berupa analisis strategi yang digunakan oleh keempat lembaga pemerintah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hasilnya, jenis strategi yang digunakan, mengerucut pada penerapan metode personal informatif, dan masal informatif, dengan implementasi media sosial yang melibatkan, teman, narasumber, dan edukator sebagai komunikator terhadap lingkungan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Teknologi, Informasi, Hoaks, Strategi, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Setiap bentuk ancaman memiliki karakteristik serta tingkat risiko yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi pola penanganannya.

Seperti halnya kecenderungan konflik terkini, pola yang dibentuk konflik terkini yaitu tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan dengan cara-cara nirmiliter, tidak langsung, dan bersifat proxy war (Clausewitz, 2007). Pola menguasai suatu negara dengan menggunakan cara asimetris yang dibangun secara sistematis. Seperti halnya penciptaan kondisi lewat propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ruang siber serta dampak revolusi industri 4.0 seperti media sosial menjadi ancaman pertahanan negara. Media sosial dapat memecah-belah komponen bangsa dalam negeri melalui propaganda.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong manusia lebih informatif dan revolusioner, serta berkomunikasi secara praktis dan dinamis. Kemunculan teknologi informasi diharapkan dapat membantu manusia untuk lebih sejahtera, aman dan nyaman (Agus, 2016). Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi justru menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, seperti halnya ancaman berbentuk nonmiliter yang mengandalkan taktik dan strategi (smart power). Contoh

ancamannya adalah menciptakan opini melalui media masa dengan tujuan tertentu dengan cara menyebarkan hoaks dan propaganda dengan strategi peperangan asimetris yaitu menyerang aspek psikologis dan penggiringan opini untuk mengurangi legitimasi pemerintah sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan rezim yang berkuasa (Hindrajid, 2016).

Fenomena persebaran informasi hoaks semakin hari semakin meningkat. Khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap Pemerintah dalam penanganan pandemic. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) periode 2020, Johnny G Plate, periode di bulan September 2020 terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi ikut andil dalam persebaran informasi hoaks. Selain itu, menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dalam periode Januari s.d September 2020, terdapat sekitar 600 hoaks terkait COVID-19 (Nimas Paramita A. A., 2021). Dan pada bulan Maret 2020 menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menerima 443 laporan berkenaan dengan ujaran kebencian.

Adapun bentuk propaganda terorisme di media sosial juga semakin meningkat pada masa pandemi Covid-19 hal ini di konfirmasi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam diskusi virtual yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengataan bahwa pada 2020 hanya sampai Juli jumlah tersangka teroris yang berhasil ditangkap sudah sekitar 100 orang. Diacara tersebut juga menjelaskan bahwa waspada adanya informasi-informasi yang dapat memprovokasi, dapat melakukan penghasutan di media sosial.

Contoh kasus persebaran informasi hoaks, salah satu yang terbesar

terdapat pada masa pandemi Covid-19, yaitu persebaran hoaks tentang vaksinasi (Dharma, 2021). Informasi yang disebarakan memiliki kecenderungan kontra terhadap rencana pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, adalah dengan cara melakukan vaksinasi tetapi mengalami hambatan, diantaranya karena pemberitaan yang tidak benar atau hoaks, seperti beredar narasi yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung mikrochip magnetis.

Narasi yang diciptakan diawali dari unggahan yang menunjukkan seseorang meletakkan koin uang Rp.1.000 di lengan bekas suntikan vaksinasi COVID-19. Hasilnya koin menempel seolah membuktikan narasi vaksin COVID-19 yang mengandung mikrochip magnetis adalah benar (Yusdianti Tenriawali, S. I, 2020). Hal tersebut membuat upaya pemerintah dalam menangani pandemi terhambat karena orang ragu untuk disuntik vaksin sehingga membuat berpotensi pengendalin Covid-19 gagal dan dapat mengancam pertahanan negara.

Fenomena persebaran Informasi hoaks yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menimbulkan ancaman secara aktual dapat mempengaruhi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) di Indonesia. Sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Jendral Ryamizard Ryacudu 2014-2019 dalam buku peperangan asimetris dan skema gaya baru, menyatakan bahwa perang modern atau perang masa kini adalah perang yang dilakukan dengan cara nonmiliter untuk menghancurkan IPOLEKSOSBUDHANKAM, perang gaya baru disebut dengan perang asimetris (Hindrajid, 2016).

Terdapat banyak informasi hoaks yang saat ini masih tersebar luas di masyarakat, dapat menimbulkan persepsi negative terhadap Pemerintah (Catherine T, 2018). Hal ini berkaitan

dengan timbulnya pertanyaan dari masyarakat terkait keterlibatan serta strategi yang digunakan oleh lembaga Pemerintah, terhadap penanganan informasi hoaks di masyarakat. Dalam hal penanganan, apabila Pemerintah gagal dalam menangani persebaran informasi hoaks, dapat menimbulkan rasa tidak percaya kepada pemerintah yang dapat berakibat pada gerakan masa yang luas sehingga menimbulkan gangguan pertahanan negara (McQuail D, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini peneliti memiliki Tujuan penelitian untuk mendapatkan hasil identifikasi persebaran hoaks yang terjadi di masyarakat, serta analisis keterlibatan lembaga-lembaga pemerintah dalam upaya strategi penanganannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Mengenai pendekatan kualitatif Bogdan dan Taylor dalam (Moleong L J, 2018), menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang- orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala- gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala- gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat (Sugiyono, 2018).

Sementara desain penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus bisa menyangkut individu, kelompok, organisasi, gerakan atau peristiwa. Data yang terkumpul lebih detail, bervariasi dan luas jangkauannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai salah satu tradisi

kualitatif (Creswell, 2010). Karena pada dasarnya studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu peristiwa, atau suatu situasi sosial. Melalui studi kasus, situasi sosial tertentu akan memperoleh penjelasan yang sangat rinci (Neuman, 2000).

Pada penelitian ini, studi kasus yang digunakan adalah persebaran informasi hoaks yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan, dan dipercaya oleh masyarakat. Adapun penelitian ini, melakukan identifikasi terhadap lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan dan penanganan persebaran informasi hoaks. Dalam hal tersebut, lembaga yang berwenang dan dimaksud didalam penelitian ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Teknik yang digunakan untuk mendukung identifikasi, berupa wawancara ahli yang dilakukan pada lembaga pemerintah tersebut. Teknik wawancara ahli terdiri dari mengidentifikasi ahli yang sesuai, bertanya tentang data di bidang keahlian mereka, dan mengukur penilaian secara subjektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi awal dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) oleh Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M. sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika informan, wawancara informan keempat pelaksanaan

wawancara pada tanggal 21 Desember 2021.

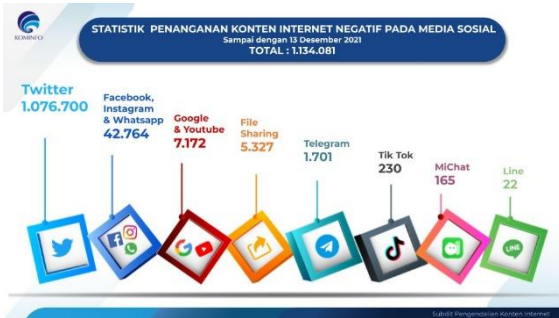
Teknologi merupakan alat yang dapat menjadi ancaman atau menjadi bermanfaat tergantung kepada pihak yang menggunakannya (Kertopati, Susaningtyas N.H , 2013). Pengguna teknologi jika memiliki motif jahat maka dapat membahayakan bangsa dan negara. Fenomena perang informasi pada masa pandemi Covid-19 semakin meningkat. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) periode 2020, Johnny G Plate, sampai 18 april 2020 terdapat 554 kasus hoaks terkait Covid-19 yang ditemukan diberbagai platform digital (Berita Satu, 2020). Dan pada bulan Maret 2020 menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menerima 443 laporan berkenaan dengan ujaran kebencian.

Temuan dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika memang ada peningkatan berita hoaks dari Agustus 2018 sampai 13 Desember 2021 khususnya dibidang kesehatan karena seiring adanya pandemi Covid-19. Sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:



Gambar 1: Berita Hoaks per katagori
Sumber: KOMINFO RI, 2021

Sebaran konten negative pada sosial media terbanyak adalah di platform twitter sebanyak 1.076.700 konten data ini diperoleh sampai dengan tanggal 13 desember 2021. Platform yang paling rendah menyumbang konten negative adalah line sebanyak 22 konten.



Gambar 2: Berita Hoaks per kategori

Sumber: KOMINFO RI, 2021

Strategi penangan dalam mencegah perang informasi adalah dengan secepatnya pemerintah menginformasikan secara resmi agar masyarakat punya patokan yang valid (Little John S W, 2009). Akan tetapi kekurangan Indonesia adalah indeks literasi masyarakat yang rendah. Hal ini sudah diatasi dengan gerakan literasi digital. Sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut,

“Problemnya absen pemerintah dalam membarikan informasi yang kurang cepat sehingga isu sudah berkembang duluan. Tujuan dari beberapa orang ini adalah berfariasi ada yang mengacaukan, ada yang niatnya dapat hanya ingin dikenal atau bener-bener tidak tahu cara pemakaian menggunakan sosial media. Cara mencegahnya adalah dengan secepatnya pemerintah melakukan informasi kepada masyarakat agar isu tidak bergulir dengan cepat.”

“Strategi penangan dalam mencegah perang informasi adalah dengan secepatnya pemerintah menginformasikan secara resmi agar masyarakat punya patokan yang valid bahwa informasi yang benar adalah dari pemerintah, tapi jika sudah terjadi hoak atau pun isu-isu yang tidak benar maka perlu kita labelin bahwa hal itu adalah tidak benar dan kita konter dengan informasi-informasi yang benar secara terus menerus. Perlu dipahami adalah semua sumber informasi di dunia digital tidak dapat dipercaya semua sampai

sumbernya terpercaya atau terkonfirmasi orang-orang atau lembaga yang kompeten maka ada istilahnya centang biru atau terverifikasi.”

“Kekurangan Indonesia adalah indeks literasi masyarakat yang rendah, sehingga kami memiliki program gerakan literasi digital yang di launching oleh bapak presiden pada hari kebangkitan nasional. Dengan harapan jika masyarakat sudah cerdas maka akan masyarakat dapat informasi yang tepat. “

Standar oprerasional prosedur dalam penangan berita hoaks atau illegal di internet pertahanan yang dilakukan adalah melihat isu yang beredar di masyarakat baik melalui laporan masyarakat atau patrol siber. Lalu setelah ditemukan laporan tersebut maka masuk ketahap rekomendasi dan diverifikasi kominfo dan instansi berwenang untuk ditindaklanjuti. Jika memang ada pelanggaran aturan maka langkah awal adalah dengan meng take down konten tersebut bahkan sampai pemblokiran.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan dan penanganan persebaran informasi hoaks. Dalam hal tersebut, lembaga yang berwenang dan dimaksud didalam penelitian ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Adapun hasil identifikasi berdasarkan keempat lembaga terkait, digambarkan pada tabel 1 dibawah:

Tabel 1 : Kesamaan dan perbedaan strategi komunikasi dalam mencegah radikalisisasi di media sosial

Badan	Khalayak	Pesan	Media Komunikasi	Metode Komunikasi	Peran Komunikator
BNPT	Menyeluruh dan Khusus ke generasi Z	Informatif dan Edukatif Khusus Radikalisasi	Media Sosial Favorit	Massal Informatif dan personal	Teman, Narasumber, Edukator
Kominfo	Mengikuti arahan BNPT	Informatif dan Edukatif Umum	Media Sosial Favorit	Massal Informatif	Teman, Narasumber, Edukator
Kemenag	Menyeluruh dan Khusus ke generasi Z	Informatif dan Edukatif Agama	Media Sosial Favorit	Massal dan Personal	Teman, Narasumber, Edukator
BSSN	Mengikuti arahan BNPT	Informatif dan Edukatif Umum	Media Sosial Favorit	Massal Informatif	Teman, Narasumber, Edukator

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa baik BNPT, Kominfo, Kementerian Agama dan BSSN hampir memiliki strategi yang sama dalam mencegah ancaman radikalisasi di media sosial. Keempat badan ini menggunakan strategi komunikasi dengan pendekatan masal melalui komunikasi informatif yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak mengikuti paham radikal dan terorisme. Adapun khalayak yang dituju adalah seluruh masyarakat pengguna media sosial, namun lebih dikhususkan untuk kaum milenial dan generasi Z. Pesan yang dibuatpun sebagian besar bersifat informatif dan edukatif untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Untuk media komunikasi yang digunakan, baik BNPT, Kominfo, Kemenag dan BSSN sama-sama menggunakan media sosial favorit yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat. Metode komunikasi yang digunakan keempat badan tersebut juga sama, yakni metode komunikasi masal dengan pesan informatif.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa Kominfo dan BSSN dalam menentukan khalayak untuk target pencegahan radikalisasi di media sosial, mengikuti arahan dan petunjuk dari BNPT. Namun berbeda untuk Kementerian agama yang secara independen memiliki survei dan evaluasinya sendiri untuk menargetkan khalayak yang akan dituju. BNPT dalam menentukan khalayaknya menggunakan rapat mingguan dan bulanan untuk bisa menentukan target khalayak mana yang akan dituju di media sosial. Dari laporan riset dan evaluasi tersebut, baik BNPT dan Kemenag sepakat bahwa secara umum target khalayak adalah seluruh masyarakat pengguna media sosial, namun target khalayak secara khusus adalah generasi milenial dan generasi Z.

Untuk pemilihan pesan dan media komunikasi yang digunakan, baik BSSN dan Kominfo memiliki pemilihan yang sama. Dimana pesan pencegahan berupa konten edukatif dan informatif secara umum dan menggunakan media komunikasi berupa media sosial favorit masyarakat. Sedangkan untuk BNPT lebih mengedepankan pesan khusus yang langsung menuju terhadap konten pencegahan radikalisasi atau teror. Sedangkan Kementerian Agama lebih menyisipkan pesan yang dibalut dengan kesan informatif keagamaan. Untuk penggunaan media komunikasi, baik BNPT dan Kemenag sama-sama memilih media sosial favorit masyarakat. Selanjutnya untuk metode komunikasi yang digunakan, baik BSSN dan Kominfo sama-sama menggunakan metode komunikasi berjenis massal dan informatif.

Sedangkan BNPT dan Kemenag memiliki tambahan komunikasi personal dengan memberikan layanan konsultasi secara personal kepada individu. Untuk peran komunikator yang dimainkan, baik BNPT, BSSN, Kemenag dan Kominfo sama-sama memainkan perang sebagai seorang teman, narasumber dan

edukator. Hal ini dilakukan untuk lebih mudah mendekati diri kepada masyarakat, dan mempermudah pengiriman informasi diterima oleh masyarakat di media sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan terkait keempat lembaga pemerintah, dalam penerapan strategi untuk dilakukannya penanganan terkait persebaran informasi hoaks. Adapun strategi yang didapatkan berdasarkan penelitian ini, dengan penerapan strategi yang selama ini digunakan oleh keempat lembaga pemerintah tersebut yaitu penerapan metode personal informatif, dan masal informatif, dengan implementasi media sosial yang melibatkan, teman, narasumber, dan edukator sebagai komunikator terhadap lingkungan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus. (2016). Deradikalisasi Dunia Maya. Jakarta : Daulat Press Jakarta.

Berita satu. (2020, Maret 14). Ini Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (L. T. Tambun, Ed.), from <https://www.beritasatu.com/kesehatan/608687/ini-tugas-gugus-tugas-percepatan-penanganan-Covid19>, diakses 25 Maret 2021

Clausewitz. (2007). On War: Translated by Michael Howard and Peter Paret. Oxford: Oxford University Press.

Creswell, J. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Catherine, T. (2018). Information Warfare: Issues for Congress. Congressional Research Service.

Dharma, A. (2021). Infodemi Covid-19 dalam Perspektif Open Government: Sebuah Tinjauan Literatur. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 6 (1), hal. 105-125

Hindrajid, A. P. (2016). Peperangan Asimetris Dan Skema Penjajahan Gaya Baru. Jakarta: Global Future Institute.

Kertopati, Susaningtyas N.H (2013). Komunikasi Dalam Kinerja Intelejen Keamanan. Jakarta: Gramedia.

Little john, S. W. (2009). Teori Komunikasi (Theories Of Human Communication) (9 ed.). Jakarta: Salemba Humanika.

McQuail, D. (2011). Teori komunikasi massa. Jakarta: Salemba Humanika

Moleong, L J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.

Nimas Paramita, A A. (2021). Tindakan Kolektif Untuk Menghadapi Hoaks. Jakarta, 619-636.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yusdianti Tenriawali, S. I. (2020). Efek Hoaks Covid-19 Bagi Igeneration DI Kabupaten Buru. Potret Pemikiran, 24, 123-142, from <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP>, diakses 8 agustus 2021